

BAB I

PENDAHULUAN

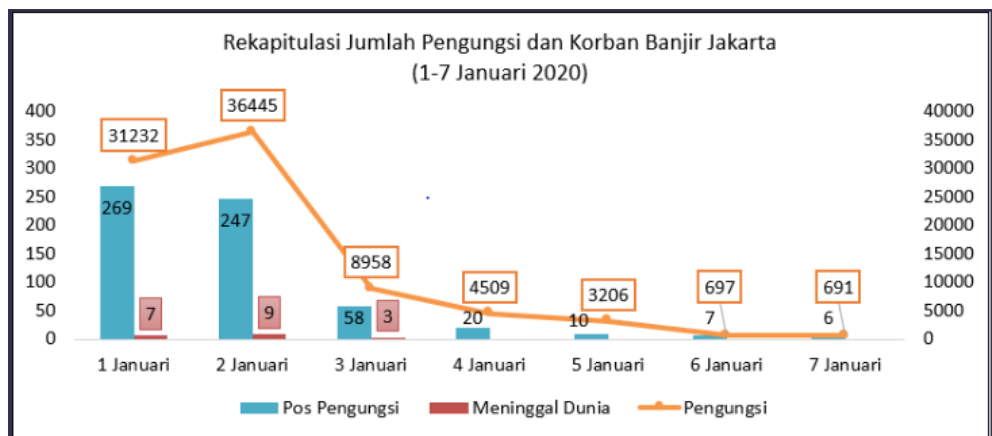
A. Latar Belakang

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) pada awal tahun 2020 kembali mengalami bencana banjir. Bencana banjir seolah tidak bisa dilepaskan dari ibu kota Jakarta. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak tanggal 31 Desember 2019 sore hari. Tidak hanya membuat jalanan macet, tetapi banjir juga menimbulkan banyak penyakit, sampah hingga cucian hanyut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa Jakarta mengalami bencana banjir terus menerus, menurut Peneliti Hidrologi Puslit Limnologi LIPI alasan pertama yaitu Jakarta berlokasi didaratan rendah dan terjadinya curah hujan akibat perubahan iklim global (Wicaksono, 2020). DKI Jakarta sebagai Ibu kota negara Republik Indonesia mempunyai letak geografis yang rentan terhadap banjir atau genangan air, baik yang berasal dari hujan maupun banjir kiriman dari daerah hulu. Pada musim hujan air melimpah memasuki Jakarta dari daerah hulu (di selatan), sementara itu bagian utara Jakarta adalah daerah pantai yang kemiringannya tidak cukup untuk mengalirkan air ke laut dengan cepat, sehingga menimbulkan genangan dan banjir (Pratiwi & Rahajoeningroem, 2020).

Pada awal tahun 2020, wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengalami banjir dan

mengakibatkan berbagai kerugian yang menimpa masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Di wilayah DKI Jakarta Setidaknya ada 66 korban meninggal yang telah dilaporkan dan dikonfirmasi, karena tanah longsor, hipotermia, tenggelam, dan tersengat listrik. Selain itu, banjir di DKI Jakarta mengakibatkan masyarakat harus mengungsi. Berikut data korban dan pengungsi akibat bencana banjir awal Januari 2020 di DKI Jakarta:

Gambar 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pengungsi dan Korban Banjir Jakarta Jakarta



Sumber: <http://statistik.jakarta.go.id/>

Jumlah pengungsi banjir awal tahun 2020 di DKI Jakarta terbanyak pada tanggal 2 Januari yaitu berjumlah 34.445 jiwa dengan pos pengungsi 247 pos. Selain itu, banjir juga mengakibatkan fasilitas publik di DKI Jakarta mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Rekapitulasi Kerusakan Fasilitas Publik



Sumber: <http://statistik.jakarta.go.id/>

Dapat dilihat bahwa diantaranya puskesmas, ruas jalan, transjakarta dan lintas rel terpadu mengalami kerusakan akibat bencana banjir tersebut. Dalam seminggu, fasilitas publik pun telah pulih sepenuhnya.

Salah satu program prioritas Pemerintah adalah upaya penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan dalam rangka untuk menciptakan Jakarta sebagai Ibu kota Indonesia yang nyaman untuk segala macam kegiatan diberbagai sektor sehingga mampu memberikan dampak positif. (Pratiwi & Rahajoeningroem, 2020). Upaya penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta telah di upayakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam penanganan banjir di DKI Jakarta, tentunya diperlukan koordinasi dari banyak pihak dan diperlukan koordinasi antar pemerintah yaitu pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah pusat serta koordinasi dengan pemerintah daerah yang wilayahnya berada disekitar daerah DKI Jakarta seperti Pemerintahan Provinsi, Jawa Barat dan Provinsi Banten. Koordinasi dapat menjadi sebuah

faktor yang dominan untuk ketidakberhasilan pemerintah pada saat menjalankan fungsi-fungsinya seperti fungsi, pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan (Febrian, 2013). E.F.L. Brech menyebutkan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing- masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007).

Penanggulangan dan penanganan banjir diperlukan. Sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam beberapa literature terdahulu, seperti pada penelitian Seputri, (2015) yang berjudul *Coordination Between Regional Work Units In Flood Mitigation In Bandar Lampung City*, penelitian ini dilaksanakan untuk untuk mengetahui koordinasi antar unit pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Heryati, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*, penelitiannya ini membahas tentang peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya Nurbaity, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahai Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015* membahas tentang koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggulangi bencana banjir yang disebabkan rob yang melanda desa Alahair pada tahun 2011-2015 dan mempunyai kesimpulan

bahwa terdapat hubungan yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan banjir yaitu seperti fungsi-fungsi yang saling terkait yaitu dalam hal perencanaan dan pelaksanaan koordinasi yang meliputi perilaku dan hubungan antar manusia, komunikasi dan kepemimpinan.

Pemerintah pusat disini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemerintah daerah meliputi Pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten harus saling berkoordinasi dalam pembentukan kebijakan untuk penanggulangan dan penanganan banjir. Hal tersebut dilaksanakan agar tercapai tujuan bersama yaitu mengatasi Masalah publik bencana banjir yang menimpa wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pemerintah pusat dalam menanggulangi dan menangani bencana banjir melalui Kementerian PUPR menyelesaikan program normalisasi sungai dan pembangunan bendungan yang berlokasi di Sukamahi dan Ciawai Kabupaten Bogor. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut merupakan bagian rencana induk tentang pengendalian banjir di DKI Jakarta dan di desain untuk mengurangi dan menahan debit air. Beberapa proyek di wilayah Ibu Kota juga diharapkan dapat segera terselesaikan misalnya proyek sedotan dari sungai ciliwung ke banjir kanal timur diharapkan dapat terselesaikan segera. Koordinasi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan dan penanganan banjir antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan yang dialami saat melaksanakan penanggulangan banjir yang selama ini melanda DKI Jakarta.

Pemerintah telah memiliki strategi besar dalam upaya penanganan banjir di wilayah dari hulu ke hilir yang telah dibuat sejak lama. Namun, persoalannya, strategi besar itu urung direalisasikan lantaran kurangnya sinergi koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam eksekusinya. Di kawasan hulu, misalnya, saat ini tengah dibangun dua bendungan yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukabumi di Kabupaten Bogor (Prabowo, 2020). Sementara itu, di wilayah hulu, Presiden meminta agar proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan. Presiden juga berharap agar Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membereskan seluruh kendala dalam pelaksanaan proyek tersebut (Prabowo, 2020).

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan di area bantaran sungai yang akan dinormalisasi. Namun, proyek normalisasi berhenti sejak 2017 atau ketika tampuk kepemimpinan DKI Jakarta berada di bawah Anies Baswedan. Adapun Anies beralasan ingin melaksanakan program naturalisasi untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Jakarta. Meski demikian, penanganan persoalan banjir di Jakarta tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Penanganan

itu jauh lebih baik bila ada sinergi antara DKI Jakarta dengan dua provinsi yang mengapitnya serta pemerintah pusat (Prabowo, 2020).

Selain dengan pemerintah pusat, koordinasi juga diperlukan dengan daerah disekitar wilayah DKI Jakarta seperti Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kedua daerah tersebut mengapit DKI Jakarta dan saling berhubungan apabila terjadi bencana banjir. Koordinasi sangat perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam menanggulangi dan menangani bencana banjir ini. Dalam melaksanakan koordinasi, tentunya harus menggunakan mekanisme koordinasi yang tepat agar tercapai tujuan bersama dan pelaksanaan program yang cepat agar dapat menangani masyarakat yang terdampak banjir dengan cepat dan dapat mencegah banjir yang akan datang.

Kita akan melihat bagaimana mekanisme koordinasi yang digunakan dalam koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan dan penanganan banjir, dengan begitu kita dapat melihat dan memahami penyebab masalah koordinasi serta dapat memahami koordinasi koordinasi yang dilaksanakan oleh antar pemerintah sehingga dapat menjadi evaluasi dan melihat mekanisme koordinasi mana yang lebih baik untuk mencapai tujuan dikemudian hari. Kita akan melihat bagaimana mekanisme koordinasi yang dilaksanakan untuk penanggulangan dan

penanganan banjir yang melanda DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Selain itu, bencana banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori bencana rutin terlebih apabila waktu musim hujan datang. Ini tentunya menjadi pertanyaan mengapa penanganan banjir belum dapat terselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan penanganan banjir DKI Jakarta harus dilaksanakan secara bersama-sama dan koordinasi yang dilaksanakan harus selaras dalam proses pembuatan kebijakan penanganan banjir DKI Jakarta. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini akan melihat mekanisme koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten yang berperan untuk menangani bencana banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk koordinasi kedepannya apakah mekanisme ini sesuai dan dapat dapat menyelesaikan permasalahan publik yaitu bencana banjir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di ambil penulis adalah: Bagaimana mekanisme koordinasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan banjir di wiliayah DKI Jakarta dan sekitarnya tahun 2020 ?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu: Untuk menjelaskan mekanisme koordinasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam menangani banjir yang terjadi pada bulan Januari 2020 di DKI Jakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mengubah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis, serta penelitian yang dilakukan ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Serta penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan khususnya bagi Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam management bencana banjir. Serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah pusat, Pemerintah DKI Jakarta dan seluruh masyarakat.